



Siaran Pers
Distrik Bobonaro
19 November 2018

Siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Bobonaro dengan senang hati menghadiri kegiatan pelatihan tentang hak-hak anak dan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sekolah mereka

Pada 8 November 2018 Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) memfasilitasi kegiatan pelatihan tentang hak-hak anak dan akses ke sistem peradilan formal untuk siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Bobonaro di Kabupaten Bobonaro.

Pelatihan ini mencakup isu-isu tentang hak-hak anak, akses ke peradilan formal, jaminan untuk hak-hak anak sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan hukum yang berlaku serta kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap anak-anak di Timor-Leste dan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, JSMP juga memperkenalkan peran Hakim, Jaksa Penuntut, Pembela Umum, Pengacara Pribadi, dan Polisi, sesuai dengan sistem peradilan formal Timor-Leste. 30 siswa berpartisipasi dalam pelatihan ini, yang terdiri dari 15 perempuan dan 15 anak laki-laki.

“Siswa di daerah pedesaan menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses informasi yang kredibel tentang hak-hak mereka dan peran lembaga-lembaga publik di bidang peradilan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan memungkinkan mereka untuk meningkatkan dan mempertajam pengetahuan mereka sehingga mereka mengetahui tentang hak-hak mereka dan mereka dapat membantu teman-teman mereka ketika mereka memiliki masalah,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Dalam masyarakat di mana pendidikan formal masih sangat terbelakang dan akses terhadap informasi terbatas, anak-anak seringkali sangat rentan karena mereka tidak tahu hak-hak mereka sehingga mereka tidak dapat membela diri.

Antonio de Jesus Borges, yang merupakan Kepala Sekolah di sekolah tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan pelatihan tentang hak anak dan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting karena akan membantu para siswa untuk mengetahui hak-hak mereka. Sejauh ini belum ada organisasi yang menyebarkan informasi tentang sektor peradilan, terutama isu-isu yang relevan tentang hak-hak anak dan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mr Borges bersyukur bahwa JSMP mengunjungi sekolahnya untuk berbagi informasi yang sangat berguna ini kepada para siswa. Selain itu, ia meminta siswa untuk menggunakan waktu mereka secara efektif untuk mendengarkan dengan seksama dan mencoba dan memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator, dan pihaknya mendorong siswa untuk segera meminta klarifikasi jika ada keraguan atau sesuatu yang

tidak jelas. Dia juga meminta para siswa untuk membagikan informasi ini dengan orang tua mereka, anggota komunitas dan teman-teman sekolah yang tidak dapat berpartisipasi dalam pelatihan ini.

JSMP mengamati bahwa sebagian besar siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini tidak memahami atau tidak memiliki informasi yang memadai tentang Konvensi tentang Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Timor-Leste serta undang-undang nasional lainnya yang melindungi mereka hak, serta kejahatan paling umum yang dilakukan terhadap anak-anak.

Oleh karena itu, JSMP memperkenalkan prinsip-prinsip dasar dan kunci dari Konvensi Hak-hak Anak. Konvensi tentang Hak Anak adalah perjanjian PBB (PBB) yang memberikan lebih banyak rincian dan pengakuan akan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak mencerminkan hak-hak dasar semua anak di dunia, termasuk hak atas hidup, pertumbuhan, hak atas perlindungan terhadap pengaruh negatif, hak untuk bebas dari penyiksaan dan eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan keluarga, budaya dan sosial.

Secara khusus, Pasal 2 (1) dan (2) Konvensi tentang Hak Anak menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus menghormati dan memastikan bahwa anak-anak tidak akan tunduk pada segala bentuk diskriminasi dan para Negara Pihak akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak dilindungi terhadap segala bentuk diskriminasi.

JSMP juga memberikan penjelasan tentang tindakan yang merupakan kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku dan penuntutan terhadap para pelaku. Kejahatan-kejahatan ini termasuk memukul, mengancam, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (termasuk pelecehan seksual dikategorikan sebagai inses), penganiayaan anak di bawah umur, dan implikasi kejahatan pada perkembangan mereka.

Pelatihan ini juga termasuk sesi di mana setiap kelompok mendiskusikan studi kasus dan setelah diskusi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil mereka.

Pelatihan diakhiri dengan menyerahkan brosur kepada Kepala Sekolah untuk dibagikan kepada para siswa yang tidak berpartisipasi dalam pelatihan ini.

Kegiatan pelatihan ini dimungkinkan dengan dukungan Kedutaan Besar Kanada di Jakarta

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
info@jsmp.tl